

ABSTRAK

Perkembangan investasi untuk saat ini sangat populer sehingga banyak yang berminat melakukan investasi untuk memenuhi kebutuhan, namun belum banyak orang tahu tentang investasi yang legal maupun ilegal sehingga banyak kasus penipuan dengan bermoduskan investasi. Biasanya investasi ilegal akan menawarkan keuntungan dan juga bonus dalam perekrutan anggota baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban dan sanksi dalam mencegah dan menindak pelaku investasi bodong. Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), jenis penelitian yuridis normatif bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis data dengan penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam bisnis investasi badan hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara fisik melainkan individu yang terlibat didalamnya yang dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan undang-undang yang berlaku. pelaku investasi ilegal atau bodong dalam penerapannya menggunakan bonus anggota baru melanggar aturan hukum pidana yaitu pasal 105 Undang-Undang No. 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Keywords: Investasi Bodong; Skema Ponzi; Pertanggungjawaban; *Cryptocurrency*



ABSTRAK

The development of investment for now is very popular so that many are interested in investing to meet needs, but not many people know about legal or illegal investments so that there are many cases of fraud with investment mode. Usually illegal investments will offer benefits and also bonuses in recruiting new members. This study aims to determine accountability and sanctions in preventing and cracking down on fraudulent investment actors. The methods used in this study are as follows: statute approach, case approach, Types of normative juridical research of primary and secondary legal materials. Data analysis techniques with literature law research. The results of this study show that in the investment business, legal entities cannot be held physically accountable, but the individuals involved in it can be held accountable in accordance with applicable laws. Illegal or fraudulent investment actors in their application using new member bonuses violate the rules of criminal law, namely article 105 of Law No. 7 of 2014 concerning Trade.

Keywords: Fraudulent Investment; Ponzi schemes; Accountability; Cryptocurrencies

